

KAPOLRI APRESIASI KOPDA NOVRIZAL Baharkam Investigasi Penyebab Laka Heli



KR-Antara/HO-Divisi Humas Polri

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyalami Kopda Ahmad Novrizal yang turut mengevakuasi Kapolda Jambi.

JAMBI (KR) - Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta, untuk menjalani perawatan lebih lanjut, karena mengalami cedera tangan kanan dan mengeluhkan sakit punggung pada saat kecelakaan helikopter yang ditumpanginya di Kabupaten Kerinci, Jambi, Minggu (19/2).

Kapolda berangkat dari Bandara Sultan Thaha Jambi menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/2) sekitar pukul 14.20 WIB menggunakan pesawat jenis Hawker 800 XP dan dilepas Gubernur Jambi Al Haris dan Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan Roswinarso mengatakan, selain Kapolda Jambi, ada satu korban lain yang juga dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yakni ajudan Kapolda Jambi Briptu Muhandi Aditya.

Tindakan medis seperti apa yang akan dijalani Kapolda Jambi, Yuda tidak mengatakan secara rinci. “Untuk tindakan medis dokter yang paham, yang jelas Kapolda membutuhkan penanganan lebih lanjut di RS Polri Kramat Jati,” katanya.

Yang mendampingi Kapolda Jambi dan ajudannya dalam perjalanan ke RS Polri Kramat Jati, yakni Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan Kapus Dokkes Polri.

Yuda menerangkan, Baharkam Polri akan melakukan investigasi penyebab kecelakaan helikopter yang

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Analisis Ekosistem Usaha Dr Hempri Suyatna



PEMERINTAH terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang berkeadilan bagi semua pelaku usaha. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Maifur Amin dalam sambutan acara Penayampaian Strategi Peningkatan Kinerja Persaingan Usaha Nasional dan Penganugerahan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2023. Wapres menyatakan akan memastikan hadirnya ekosistem usaha yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku usaha.

Pernyataan yang disampaikan ini menarik untuk dikaji. Mengingat gagasan-gagasan mengenai pengembangan ekosistem usaha ini sebenarnya sudah muncul sejak lama. Namun demikian praktik yang terjadi ekosistem usaha yang ada cenderung lebih menguntungkan elite ekonomi. Padahal dalam sebuah artikel di harian Fikiran Raijat Tahun 1932, Soekarno pernah menyampaikan gagasannya bahwa sosio demokrasi yang dipikirkan Soekarno bukan sekadar menempatkan kedaulatan rakyat secara politik yang dimanifestasikan dalam pemilihan umum. Melainkan juga kedaulatan rakyat secara ekonomi, yang dimanifestasikan dengan kecilnya ketimpangan sosial-ekonomi, tidak terjadinya eksploitasi ekonomi, dan tidak adanya segelintir elite ekonomi (borjuasi) yang menguasai begitu banyak sumber daya ekonomi.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:55	15:01	18:04	19:14	04:26
Kamis, 23 Februari 2023					

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

KORUPSI PENGADAAN HELI AW-101 Pengusaha Penyedia Divonis 10 Tahun

JAKARTA (KR) - Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsidier 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi Pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara Tahun 2016 dengan nilai kerugian keuangan negara Rp 17,22 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa John Irfan dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar diganti kurungan selama 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Djumyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (22/2).

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Irfan Kurnia Saleh divonis 15 tahun penjara ditambah Rp 1 miliar subsidier 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 177.712.972.054,6 subsidier 5 tahun kurungan.

Majelis Hakim memutuskan Irfan Kurnia hanya dikenai hukuman uang pengganti sebesar Rp 17,22 miliar. “Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Dikenai Sanksi Demosi Setahun Bharada E Dipertahankan di Polri

JAKARTA (KR) - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi administrasi berupa demosi (memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah) selama satu tahun kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) atas pelanggaran etik berupa perbuatan pidana dalam perkara pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Dalam putusan Sidang KKEP, yang dibacakan Rabu (22/2), komisi sidang menyatakan tetap mempertahankan Bharada Eliezer sebagai personel Polri.

“Menjatuhkan sanksi administrasi bersifat demosi selama satu tahun,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo-penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.

Selain saksi administrasi, Komisi Etik Polri menjatuhkan sanksi bersifat etika karena perbuatan pelanggaran dinyatakan sebagai tercela. Eliezer juga dijatuhi sanksi kewajiban untuk meminta maaf di hadapan Sidang KKEP dan pimpinan Polri.

Komisi Etik Polri menyebut wujud pelanggaran Eliezer adalah melakukan penembakan kepada Brigadir J di Kompleks Duren Tiga serta menggunakan senjata api dinas Polri jenis pistol merek Glock dengan nomor senjata api MPV 851 tidak sesuai dengan ketentuan.

Eliezer dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf O dan atau Pasal 6 ayat 2 huruf b dan atau Pasal 8 huruf b dan c, dan atau Pasal 1 ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan

Komisi Kode Etik Polri.

Ramadhan mengatakan, dalam memutuskan sanksi etik kepada Eliezer, Komisi Kode Etik Polri telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut, di antaranya statusnya sebagai saksi pelaku (*justice collaborator/JC*), permintaan maaf Eliezer kepada keluarga Brigadir J dan adanya pemberian maaf dari keluarga Brigadir J, usianya masih muda serta bersikap jujur dan status kepangkatan Eliezer yang lebih rendah dari atasannya, sehingga tidak berani melanggar perintah.

Dengan pertimbangan tersebut, komisi etik memutuskan untuk mempertahankannya sebagai personel Polri sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf a PP No 1 Tahun 2003. “Maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat, terduga pelanggaran masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri,” ujar Ramadhan.

Eliezer terkena sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun ke Bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polri dan sanksi berlaku selama satu tahun.

Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menjadi salah satu saksi dalam sidang KKEP terhadap Bharada E yang berlangsung di Gedung TNCC Mabes Polri, kemarin.

*** Bersambung hal 7 kol 1**



KR-Antara/Asprilla Dwi Adha
Richard Eliezer

PEMBEBASAN PILOT SUSI AIR

Penyelamatan Tanpa Kekerasan

DENPASAR (KR) - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan pembebasan pilot maskapai Susi Air, Philips Mark Methrtens (37), dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) lebih mengutamakan persuasif. Pihaknya mengupayakan penyelamatan tanpa kekerasan dan mengedepankan peran pemerintah daerah setempat, tokoh adat dan tokoh masyarakat.



KR-Antara/Galih Pradipta

Laksamana TNI Yudo Margono

“TNI bersama Polri masih berupaya terus. Ini adalah penegakan hukum, tidak langsung operasi militer. Hal ini tentunya tetap mengedepankan penegakan hukum. Karena ini orang asing yang disandera KKB, tetap diupayakan dengan cara-cara persuasif,” kata Laksamana TNI Yudo Margono usai melaksanakan olahraga bersama di GOR

*** Bersambung hal 7 kol 1**

NasDem Temui Demokrat, Perkuat Hubungan

JAKARTA (KR) - Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menemui Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Rabu (22/2). Pertemuan itu disebut sebagai bentuk memperkuat hubungan kedua parpol itu.

“Silaturahmi aja untuk memperkuat hubungan satu dengan lainnya. Karena Mas AHY sudah berulang kali datang ke NasDem Tower dan ini kunjungan balasan Pak Surya untuk memperbincangkan banyak hal,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya kepada wartawan..

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengata-



KR-Antara/Galih Pradipta

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) membisikkan sesuatu kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri), saat memberikan keterangan pers usai pertemuan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.

kan, pertemuan AHY dan Surya Paloh membicarakan isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini. Termasuk gugatan atau *judicial review* sistem

pemilu proporsional terbuka dan upaya penundaan Pemilu 2024.

“Pembentukan Sekretariat Perubahan, persiapan penandatanganan MoU

MENKEU: PER JANUARI 2023

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Rp 18,41 T

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) telah mencapai Rp 18,41 triliun per Januari 2023 atau tumbuh 4,97 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoY).

“Kenaikan penerimaan disebabkan oleh peningkatan tarif CHT,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Februari 2023 di Jakarta, Rabu (22/2). Selain itu, kata Menkeu, terdapat pula limpahan penerimaan dari pemesanan pita cukai pada November 2022 yang dilunasi pada Januari 2023.

Meski demikian, ia mengungkapkan, pertumbuhan realisasi penerimaan CHT melambat dibanding 2022 yang sebesar 98,67 persen akibat penurunan produksi

*** Bersambung hal 7 kol 5**

dan deklarasi Koalisi Perubahan juga menjadi pokok bahasan di antara kedua tokoh ini,” ujar Herzaky.

Sebelumnya, Surya Paloh pernah menemui Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Kunjungan tersebut merupakan silaturahmi politik pertama sejak pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhir Januari lalu.

Kepada wartawan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan, keputusan calon wakil presiden (cawapres) koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan kewenangan bakal Capres Anies Baswedan. Ia sendiri menilai, Ke-

tua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pantas menjadi cawapres Anies.

“Itu adalah pemahaman saya dan mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kalau ditanya pantas? Sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas,” ujar Surya Paloh, kemarin.

Ia melihat AHY sebagai sosok yang memiliki fisik dan pemikiran tepat untuk menjadi cawapres Anies.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● **ISTRI** saya sedang menyimak murojaah dari dua orang santri dengan bacaan berbeda. Lalu kedua santri berhenti pada bacaan yang sama; “ulaaika”. Hening, kedua santri tersebut berhenti membaca dan sama-sama menunggu instruksi dari penyimak bacaan setelahnya. Seketika mereka bertiga tertawa dan kedua santri itu kesulitan memulai bacaan lagi. (Anjaha Naufal Muhammad, Jalan Moh Besar, Kutasari Baturaden)-f

PROMO TAHUN BARU 2023

PROMO SCALLING

PROMO TAMBAL GIGI KOMPOSIT

Benefit:

- Konsultasi dokter gigi gratis
- Pemeriksaan kesehatan gigi gratis
- Konsultasi dokter gigi gratis
- Pemeriksaan kesehatan gigi gratis
- Konsultasi dokter gigi gratis
- Pemeriksaan kesehatan gigi gratis

RS PKU Bantul

MELAHIRKAN NYAMAN

ERACS

Pendaftaran ☎ 08123 638 678

DATA KASUS COVID-19

1. Nasional:

- Pasien positif : **6.734.818 (+212)**
- Pasien sembuh : **6.570.305 (+195)**
- Pasien meninggal : **160.894 (+2)**

2. DIY:

- Pasien positif : **230.274 (+2)**
- Pasien sembuh : **224.114 (+6)**
- Pasien meninggal : **6.077 (+0)**

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Permda DIY. (Rial/tra)

Memakai masker cegah penularan penyakit

ILUSTRASI JOS